

Daftar Pustaka

BUKU

- Deddy Ismatullah, *Politik Hukum Dalam Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung , Remaja Rosdakarya, Tahun 2018
- Fuady Munir, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Tahun 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Nasrullah, Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada Dan Desain Badan Peradilan Khusus*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurus Zaman, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam system Pemerintahan Di Indoneisa*. Refika, Bandung, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Suratman, Hayat & Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana , 2011.
- Topo Santoso,. Ida Budhiati. 2019, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika , Jakarta Timur.

JURNAL

- Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Vol. 2 No.2 , Tahun 2015.
- Aprista Ristyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid – 19 Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Vol. 2 No. 2, November 2020

Arief Hidayat, Bernegara itu tidak mudah(dalam perspektif hukum) pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Undip Semarang 1 April 2008.

Diah Arum Hapsari, *Wacana Pro Kontra Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid – 19 Pada Pemberitaan Online*, Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Vol. 3 No. 2, Tahun 2021.

Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014.

Fransiska Kurniawati, *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara 2009.

Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah kerangka Konseptual untuk memahami dinamika sosial dan politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 1 No. 1,2012.

Jamil, Dian Ferricha, *Penundaan Pilkada Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseasee*. Universitas Bhayangkara Surabaya & Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Josner Simanjuntak, *Kemandirian Lembaga Penyelenggaraa Pemilihan Umum Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasih, Papua. Papua Law Jurnal. Vol. 1 Issue. 1, Hal. 127 November 2016.

Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Lalu Kukuh Sekartadi, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No. 74/ DKPP – PKE – II/2013)* Universitas Mataram Vol. III No. 8, 2015.

Maria Puput Ristyastuti, Muhammad Sya'roni Rofii, *Analisis Naratif Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid – 19 Di Indonesia*, Jakarta - Universitas Indonesia, Vol. 8 No,2, Tahun 2011.

Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017.

Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jambi.Vol. 2 No.2.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. Jakarta.

Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, *Diskursus Hukum:Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala DaerahdiMasa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2 No.2 Tahun 2020.

Rusmawati Tambaru, pengaruh kecemasan pandemi covid 19 terhadap pengeluaran asi ibu post partum dibidan praktik mandiri, kementrian kesehatan republik indonesia politeknik kesehatan kalimantan timur, jurusan kebidanan, 2020.

Sholahuddin Al-Fatih, *Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021

Soni Sumarsono, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 2016).

Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. *Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Vokus Media, 2003).

Yuliana, *Sebuah Tinjauan Literasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2, (Lampung, 2020)

Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestarini, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi Covid – 19*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Ilmu Politik, Vol 2, No. 2

Zakiah Aprilia, upaya guru dalam meningkatkan aktifitas belajar pada pembelajaran tematik siswa masa pandemi covid 19, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

–

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019(covid19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

INTERNET

“Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.